



Implementasi Program KRPPA sebagai Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya

Levina Linadi¹, Verysa Virgie Rahmadhani², Siti Nur Fahreza Irena³, Amanda Adzkiyah⁴, Revalia Cantika Sari Setiawan⁵, Tjitjik Rahaju⁶, Ardiyansah⁷

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi : 24040674131@mhs.unesa.ac.id¹, 24040674136@mhs.unesa.ac.id², 24040674157@mhs.unesa.ac.id³, 24040674160@mhs.unesa.ac.id⁴, 24040674162@mhs.unesa.ac.id⁵, tjitjikrahaju@unesa.ac.id⁶, ardiyansah@unesa.ac.id⁷

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Women-Friendly and Child-Caring Village Program (KRPPA) in Sidotopo Village, Surabaya City. The analytical method used refers to the Van Meter and Van Horn policy implementation theory. The results of the study indicate that the implementation of the KRPPA program in Sidotopo Village has generally been running adequately as a concrete effort to provide protection for women and children as vulnerable groups. The success of this program is supported by the formulation of clear objectives, cross-institutional collaboration, active support from local community leaders, and the existence of PUSPAGA services. Coordination between Sidotopo Village and the DP3A of Surabaya City has also been running smoothly through regular meetings and digital-based monitoring. However, program implementation still faces several obstacles, including budget limitations due to the lack of a special fund allocation from the Regional Budget (APBD), so most activities depend on community self-help. In addition, patriarchal cultural barriers and stigma against domestic problems lead to low reporting of violence cases. The capacity of human resources, especially field cadres, also still needs to be improved, along with expanded outreach to the community. By strengthening these aspects, the KRPPA program is expected to run more optimally and have a tangible impact on the protection and empowerment of women and children in Sidotopo Village.

Keywords: KRPPA, Policy Implementation, Protection of Women and Children, Van Meter and Van Horn, Sidotopo Village

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya. Metode analisis yang digunakan mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KRPPA di Kelurahan Sidotopo secara umum telah berjalan secara memadai sebagai upaya konkret dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Keberhasilan program ini didukung oleh rumusan tujuan yang jelas, kolaborasi lintas lembaga, dukungan aktif tokoh masyarakat setempat, serta keberadaan layanan PUSPAGA. Koordinasi antara Kelurahan Sidotopo dan DP3A Kota Surabaya juga telah berlangsung lancar melalui rapat berkala dan pengawasan berbasis digital. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan anggaran karena belum tersedianya alokasi dana khusus dari APBD, sehingga sebagian besar kegiatan bergantung pada swadaya

masyarakat. Selain itu, hambatan budaya patriarki dan stigma terhadap permasalahan rumah tangga menyebabkan rendahnya pelaporan kasus kekerasan. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya kader lapangan, juga masih perlu ditingkatkan, seiring dengan perluasan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan penguatan pada aspek-aspek tersebut, program KRPPA diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di Kelurahan Sidotopo.

Kata Kunci: KRPPA, Implementasi Kebijakan, Perlindungan Perempuan dan Anak, Van Meter dan Van Horn, Kelurahan Sidotopo

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan global yang bertujuan menciptakan kondisi setara antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dalam konteks pembangunan internasional, kesetaraan gender menjadi bagian dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima yang menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan (United Nations, 2024). Namun demikian, implementasi kesetaraan gender di berbagai negara masih menghadapi tantangan yang kompleks, seperti tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, serta kuatnya budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat (UN Women, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gender tidak hanya berkaitan dengan perbedaan biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang membentuk relasi tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Di Indonesia, persoalan kesetaraan gender juga masih menjadi isu yang cukup serius. Meskipun perempuan mulai memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan pekerjaan, ketimpangan gender masih terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, sementara kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat menyebabkan perempuan sering kali berada pada posisi yang rentan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat (Walby, 2020). Perempuan juga masih menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan pendapat, mengambil keputusan, serta berpartisipasi dalam ruang publik (Eagly & Koenig, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan masih perlu diperkuat melalui kebijakan pemerintah yang responsif gender.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengarusutamaan gender, pemerintah Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak, salah satunya melalui Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak melalui

keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan berbasis gender. KRPPA juga menjadi bagian dari strategi pembangunan di tingkat lokal untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan partisipasi perempuan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak perempuan dan anak (KemenPPPA, 2021). Implementasi program ini dinilai penting karena kelurahan merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran strategis dalam menangani berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang mengimplementasikan Program KRPPA sebagai bentuk penguatan pembangunan yang responsif gender. Salah satu wilayah yang menjadi fokus implementasi program tersebut adalah Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Surabaya. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial masyarakat yang cukup kompleks dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, serta masih ditemukannya berbagai persoalan sosial yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan DP3A Kota Surabaya, kawasan Surabaya Utara masih menjadi salah satu wilayah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang relatif tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Surabaya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan anak di wilayah tersebut masih berada dalam situasi rentan sehingga membutuhkan penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan berbasis masyarakat melalui implementasi Program KRPPA.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi program ramah perempuan dan peduli anak di berbagai daerah. Penelitian Farhani dan Falasifah (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi Program Rukun Warga Responsif Gender mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan berbasis komunitas. Penelitian Pitaloka dan Astuti (2025) menjelaskan bahwa Program KRPPA di Kelurahan Babat Jerawat cukup efektif dalam mendukung pengarusutamaan gender melalui kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat, meskipun masih menghadapi kendala koordinasi dan pelatihan kader. Selain itu, penelitian Martiani (2024) mengenai implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh komunikasi, partisipasi masyarakat, serta dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Diah Puspaningrum dkk. (2023) juga menegaskan bahwa komunikasi pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program perlindungan perempuan dan anak.

Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi program ramah perempuan dan peduli anak, penelitian mengenai implementasi Program KRPPA di wilayah perkotaan dengan karakteristik sosial masyarakat yang kompleks masih relatif terbatas, khususnya di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan efektivitas program secara umum, sedangkan

penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan Program KRPPA menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program, bentuk koordinasi antar pelaksana, dukungan sumber daya, serta berbagai faktor sosial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program KRPPA di tingkat kelurahan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses implementasi Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) serta bertujuan memahami pengalaman, persepsi, dan pandangan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A) Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Kedungsari No. 18, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, serta di Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya sebagai salah satu lokasi implementasi Program KRPPA. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga April 2026.

Fokus penelitian mengacu pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, serta disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dan observasi terkait pelaksanaan Program KRPPA, partisipasi masyarakat, serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian. Informan penelitian terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci meliputi Sekretaris Kelurahan Sidotopo dan pegawai DP3A Kota Surabaya. Informan utama terdiri atas kader PKK serta ketua RT dan RW yang terlibat dalam pelaksanaan program. Adapun informan pendukung meliputi warga perempuan dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi nonpartisipatif. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai implementasi Program KRPPA, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan pelaksanaan program di lapangan tanpa keterlibatan peneliti dalam kegiatan. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman wawancara sebagai instrumen penunjang.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan implementasi Program KRPPA. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk deskripsi naratif secara sistematis agar mudah dipahami. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai implementasi Program KRPPA sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender di Kelurahan Sidotopo, Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kelurahan Sidotopo merupakan wilayah perkotaan di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi dengan komposisi masyarakat yang heterogen akibat banyaknya pendatang dari berbagai daerah. Secara fisik, kawasan ini didominasi permukiman padat dengan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi informal, seperti pengumpulan dan penjualan barang bekas yang menjadi sumber penghidupan sebagian besar warga (Pasciana et al., 2024). Meskipun solidaritas sosial dan budaya gotong royong masih terpelihara dengan baik di tengah masyarakat (Farhani dan Falasifah, 2024), persoalan kekerasan terhadap perempuan dan konflik sosial kerap diselesaikan secara internal tanpa melibatkan pihak kelurahan. Kondisi ini diperparah oleh kuatnya budaya patriarki yang membatasi kebebasan perempuan dalam berpendapat, mengambil keputusan, maupun berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Susanti et al., 2023), sehingga perempuan di wilayah ini masih menghadapi berbagai kerentanan sosial yang kompleks.

Sebagai respons atas persoalan tersebut, Program Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang diinisiasi oleh Kemen PPPA dan diperkuat melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 13 Tahun 2021 hadir sebagai strategi pembangunan lokal untuk mewujudkan kesetaraan gender serta memperkuat perlindungan perempuan dan anak di tingkat kelurahan. Di Kelurahan Sidotopo, program ini dilaksanakan melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang melibatkan aparatur kelurahan, kader lingkungan, RT/RW, serta DP3A Kota Surabaya, termasuk dukungan layanan PUSPAGA sebagai pusat konsultasi dan pembelajaran keluarga (DP3A Kota Surabaya, 2024). Farhani dan Falasifah (2024) menegaskan bahwa program semacam ini tidak hanya berorientasi pada penanganan kasus, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat secara

berkelanjutan, di mana sinergi antara pemerintah lokal dan partisipasi warga menjadi kunci keberhasilannya (Pasciana et al., 2024).

Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo dilaksanakan sebagai upaya konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan dan anak di tengah kehidupan masyarakat. Fokus utama program ini mencakup pemberian pendidikan, pendampingan, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pengaruh negatif lingkungan, serta pernikahan dini yang masih kerap terjadi di wilayah tersebut. Anak-anak secara khusus diajarkan cara melindungi diri dari pengaruh buruk, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun dari lingkungan keluarga terdekat mereka. Sementara itu, perempuan juga mendapatkan perhatian dan dorongan agar berani mengungkapkan permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan melalui serangkaian kegiatan edukasi dan pendampingan yang dilakukan secara teratur oleh kader, pengurus RT/RW, dan aparat kelurahan yang saling berkolaborasi dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Materi edukasi yang disampaikan mencakup cara menjaga keselamatan anak, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak. Koordinasi dengan DP3A Kota Surabaya dilakukan secara rutin setiap Selasa melalui pertemuan daring guna mengevaluasi perkembangan dan memantau jalannya program, sementara layanan konseling PUSPAGA dibuka setiap Kamis untuk melayani pengaduan maupun pendampingan warga yang membutuhkan bantuan terkait isu keluarga dan perlindungan anak.

Meskipun program telah berjalan melalui berbagai kegiatan tersebut, pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Kendala terbesar berasal dari rendahnya keterbukaan masyarakat, di mana banyak warga yang masih enggan melaporkan kasus kekerasan karena menganggapnya sebagai aib keluarga yang memalukan jika diketahui oleh pihak luar. Sikap tertutup ini menyulitkan proses pendataan kasus dan penanganan masalah secara cepat dan tepat sasaran. Di samping itu, persoalan sosial lain seperti pernikahan anak di bawah umur, putus sekolah akibat pernikahan dini, serta konflik antarwarga yang bersumber dari masalah pribadi juga masih kerap terjadi dan belum sepenuhnya tertangani. Dari aspek pendanaan, program belum memiliki alokasi anggaran khusus dari APBD sehingga pelaksanaan kegiatan masih sangat bergantung pada pemanfaatan fasilitas yang tersedia, seperti balai RW, serta dukungan swadaya masyarakat melalui skema Sumbangan Kampung Madani. Keterbatasan dari sisi sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat tidak semua kader maupun warga memiliki pemahaman yang selaras mengenai urgensi program perlindungan perempuan dan anak. Mekanisme pelaporan dalam program ini dilakukan dengan meneruskan informasi dari masyarakat kepada kader, RT/RW, lalu ke pihak kelurahan yang selanjutnya berkoordinasi dengan DP3A melalui surat maupun surat elektronik. Apabila tidak terdapat kasus khusus, pelaporan cukup dilakukan melalui pencatatan kegiatan

dan absensi yang diunggah lewat tautan yang telah disediakan oleh DP3A. Secara keseluruhan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, efektivitas program KRPPA di Kelurahan Sidotopo masih perlu ditingkatkan melalui penguatan keterbukaan masyarakat, perbaikan dukungan anggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat.

Tujuan Kebijakan dan Standar yang Jelas

Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan nyata bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan di lingkungan masyarakat. Secara khusus, program ini diarahkan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih kerap terjadi di tengah masyarakat. Selain perlindungan bagi perempuan, program ini juga berupaya membekali anak-anak dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menjaga diri dari pengaruh negatif, baik yang berasal dari lingkungan luar maupun dari lingkungan keluarga terdekat mereka sendiri. Dengan pembinaan yang dimulai dari unit keluarga, diharapkan anak dapat mengenali perilaku berbahaya dan memiliki keberanian untuk melindungi diri dari berbagai bentuk kekerasan maupun penyimpangan sosial.

Meskipun tujuan program telah dirumuskan dengan cukup jelas, pengukuran keberhasilan pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Tantangan terbesar berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kader, serta rendahnya keterbukaan masyarakat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak. Banyak warga yang masih cenderung menutup diri sehingga proses pengumpulan data dan pengukuran dampak program menjadi sulit dilaksanakan secara akurat. Untuk menjaga agar pelaksanaan program tetap selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan, berbagai upaya pemantauan dilakukan secara rutin, di antaranya melalui kegiatan PUSPAGA yang aktif menjalankan fungsi pendampingan masyarakat, koordinasi rutin setiap Selasa via Zoom bersama pemerintah kota dan DP3A, serta pembukaan layanan konseling setiap Kamis bagi warga yang membutuhkan pendampingan. Namun layanan konseling tersebut masih menemui hambatan karena sebagian besar warga merasa malu dan enggan untuk mengungkapkan permasalahan yang mereka alami secara terbuka.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan implementasi Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo. Dari aspek keuangan, program ini belum didukung oleh alokasi anggaran khusus dari APBD, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang secara langsung diperuntukkan bagi pelaksanaan KRPPA di tingkat kelurahan. Kondisi ini menjadikan program sangat bergantung pada dukungan dari DP3A Kota Surabaya, yang kontribusinya lebih difokuskan pada penyediaan tenaga pematerei dan narasumber dari unsur pentahelix, seperti akademisi, LSM, dunia usaha, dan media massa, untuk mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat. Meskipun demikian,

program tetap dapat berjalan berkat adanya skema pembiayaan alternatif melalui Sumbangan Kampung Madani yang dialokasikan di setiap kelurahan.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan program melibatkan aparat kelurahan, kader, RT/RW, serta pelaksana layanan PUSPAGA. Namun demikian, kesiapan dan kemampuan SDM yang terlibat dinilai belum merata. Tidak semua kader dan pelaksana konseling PUSPAGA memiliki pemahaman dan kapasitas yang setara dalam menjalankan program, sehingga efektivitas pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, DP3A telah melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi perangkat kelurahan, kader, serta satgas secara berkala. Sementara dari sisi sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia masih bersifat seadanya. Meski begitu, kegiatan program tetap dapat berlangsung, salah satunya melalui agenda konseling PUSPAGA yang diselenggarakan secara daring via Zoom setiap minggunya bersama pihak DP3A.

Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi dan komunikasi antarorganisasi dalam implementasi Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo telah berjalan secara terstruktur melalui mekanisme yang melibatkan pihak kelurahan, kader, RT/RW, serta DP3APPKB Kota Surabaya. Komunikasi vertikal antara pemerintah kota dan pihak kelurahan dilakukan secara rutin melalui Zoom Meeting setiap Selasa, yang dimanfaatkan untuk membahas perkembangan pelaksanaan program, mengevaluasi kendala di lapangan, serta menerima arahan dari pemerintah kota. Hal ini menunjukkan bahwa alur komunikasi formal dalam implementasi program telah berjalan dengan cukup konsisten. Sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn (1975), komunikasi yang jelas dan konsisten merupakan faktor krusial yang memengaruhi koordinasi antarpelaksana dan keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Selain koordinasi formal, komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan melalui layanan konseling PUSPAGA setiap Kamis, yang membuka ruang bagi warga untuk melakukan pengaduan maupun konsultasi terkait persoalan perempuan dan anak. Informasi mengenai kebijakan dan kegiatan program kemudian disebarluaskan kepada masyarakat melalui RT, RW, dan kader di lingkungan kelurahan. Pemantauan program juga dilakukan melalui sistem pelaporan digital berupa dokumentasi kegiatan dan absensi yang diunggah melalui tautan yang disediakan oleh DP3A. Meski demikian, komunikasi dengan masyarakat masih terkendala oleh rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan. Banyak warga yang memilih menutup diri karena adanya rasa takut, stigma sosial, serta anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan urusan pribadi yang tidak sepatutnya diketahui oleh pihak luar, sehingga proses penanganan kasus sering kali mengalami keterlambatan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Struktur organisasi pelaksana Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo telah terbentuk secara formal dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang cukup jelas. Struktur tersebut terdiri atas pembina yang sekaligus menjabat sebagai lurah,

ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta koordinator inventarisasi data. Di luar jajaran inti tersebut, terdapat dua bidang utama yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program, yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan yang berfokus pada peningkatan kapasitas dan edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan, serta Bidang Perlindungan Anak yang berfokus pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Keberadaan struktur yang terorganisir ini memungkinkan setiap bidang bekerja secara lebih terarah sesuai dengan fokus dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain melibatkan perangkat kelurahan, program ini juga mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat seperti Kader Surabaya Hebat, Satgas PPA, fasilitator PKBM, dan Karang Taruna. Keterlibatan multi-aktor ini memperkuat pelaksanaan program dari berbagai sisi, baik secara administratif maupun dalam dimensi sosial kemasyarakatan. Dengan lurah sebagai pembina yang memberikan pengawasan dan arahan, serta adanya koordinator di setiap bidang, mekanisme kontrol hierarkis dalam program ini berjalan dengan cukup terstruktur. Secara keseluruhan, karakteristik organisasi pelaksana KRPPA di Kelurahan Sidotopo telah memenuhi sejumlah aspek penting, meliputi kejelasan struktur, pembagian peran yang terorganisir, serta keterlibatan berbagai aktor dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi

Kondisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di Kelurahan Sidotopo membentuk konteks implementasi yang bersifat kontradiktif. Dari sisi sosial, hambatan kultural menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan program. Sebagian besar warga masih bersikap tertutup dan enggan membicarakan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara terbuka, karena persoalan tersebut masih dianggap sebagai aib keluarga yang tidak layak diketahui pihak luar. Budaya sungkan dan dorongan untuk menjaga kehormatan keluarga yang mengakar kuat di masyarakat menyebabkan proses deteksi dini dan penanganan kasus menjadi terhambat, sehingga pelaksana program dituntut untuk mengembangkan pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis kepercayaan guna mendorong keterbukaan warga secara bertahap.

Di sisi lain, secara normatif masyarakat sesungguhnya mengakui pentingnya program KRPPA dan menunjukkan dukungan terhadap keberadaannya. Tokoh-tokoh masyarakat setempat juga turut berperan aktif dengan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan program melalui semangat gotong royong, yang mencerminkan adanya legitimasi sosial di tingkat komunitas. Dukungan normatif ini merupakan modal sosial yang penting dalam proses implementasi, meskipun belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dari aspek ekonomi, program tidak membebani warga secara langsung karena kebutuhan operasional ditopang melalui skema Sumbangan Kampung Madani yang dialokasikan di tiap kelurahan, sehingga keberlangsungan program tetap terjaga terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas bergantung pada sektor informal.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi efektivitas implementasi Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo. Secara umum, aparat kelurahan dan kader yang terlibat telah memiliki pemahaman yang cukup memadai mengenai tujuan dan arah program, khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, serta pendampingan masyarakat. Komitmen pelaksana juga tercermin dari keaktifan mereka dalam menyosialisasikan pentingnya perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan kekerasan kepada warga di lingkungan kelurahan.

Tingkat pemahaman dan komitmen antarpelaksana masih belum merata. Tidak semua aparat maupun kader memiliki kesiapan yang sama, yang dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas SDM dan pola pikir individu dalam memaknai pentingnya program perlindungan perempuan dan anak. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan masih sangat diperlukan. Dalam praktiknya, upaya peningkatan komitmen dilakukan melalui koordinasi berjenjang dari kelurahan hingga kader, di mana setiap kader diberi tanggung jawab untuk mendampingi sekitar 20 kepala keluarga di wilayahnya. Mekanisme ini dirancang agar penyampaian informasi dan pemantauan kondisi masyarakat dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjangkau lebih banyak warga secara langsung.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KRPPA di Kelurahan Sidotopo secara umum telah berjalan cukup memadai sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak. Keberhasilan program ditopang oleh kolaborasi lintas lembaga, layanan PUSPAGA, kejelasan tujuan, serta dukungan aktif tokoh masyarakat setempat. Koordinasi dengan DP3A Kota Surabaya juga telah berlangsung lancar melalui rapat berkala dan pengawasan berbasis digital. Namun demikian, program masih menghadapi sejumlah hambatan, di antaranya keterbatasan anggaran karena belum adanya alokasi khusus dari APBD sehingga kegiatan masih bertumpu pada swadaya masyarakat melalui Sumbangan Kampung Madani. Hambatan kultural berupa keengganan warga melaporkan kasus kekerasan yang dianggap sebagai aib keluarga juga masih menjadi tantangan tersendiri. Peningkatan kapasitas kader lapangan, perluasan sosialisasi, serta upaya mengikis budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat menjadi langkah penting agar pelaksanaan KRPPA ke depan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Eagly, A. H., & Koenig, A. M. (2021). The vicious cycle linking stereotypes and social roles. *Current Directions in Psychological Science*, 30(4), 343–350.
- Farhani, M., & Falasifah, N. (2024). Optimalisasi Program Rukun Warga Responsif Gender untuk Mewujudkan Kelurahan Dr. Soetomo Ramah Perempuan dan Peduli Anak. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(4), 01-14.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Kelurahan ramah perempuan dan peduli anak*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). SIMFONI PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Martiani, A. T. (2024). Implementasi Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (DRPPA) Di Desa Sempor Lor Dan Desa Pandansari Purbalingga. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 392-409.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications. <https://www.scribd.com/document/190583243/148016230-Qualitative-Data-Analysis-an-Expanded-Sourcebook-2nd-Edition>
- Pasciana, R., et al. (2024). Transformasi sosial melalui pemberdayaan perempuan dan anak. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/azzahra/article/view/38557>
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak.
- Pitaloka, Y. A., & Astuti, S. J. W. (2025). THE EFFECTIVENESS OF THE KRPPA PROGRAM FOR GENDER MAINSTREAMING IN BABAT JERAWAT VILLAGE. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 15(2), 303-310.
- Puspaningrum, D., Aji, J. M. M., Subekti, S., & Fauziah, D. (2023). Komunikasi Pembangunan dalam Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Anak. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 7(1), 255-267.
- Susanti, E., et al. (2023). Pemberdayaan perempuan dan anak sebagai wujud pelaksanaan desa ramah perempuan dan peduli anak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*. <https://jss.lppm.unila.ac.id/index.php/ojs/article/view/457>
- UN Women. (2024). Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2024. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/09/progress-on-the-sustainable-development-goals-the-gender-snapshot-2024>
- United Nations. (2024). The Sustainable Development Goals Report 2024: Goal 5 Gender Equality. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/goal-05/>
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://www.scribd.com/document/398049227/Van-Meter-The-Policy-Implementation-Process-A-Conceptual-Framework-docx>
- Walby, S. (2020). *Varieties of gender regimes*. *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 27(1), 1-20.